

TESIS

ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN PT. NO.48/PDT/2018/PTBJM)



Oleh :

**LEVANA ADELLA PRISCILIA
2420215320142**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PRINSIP STRICT LIABILITY
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN PT.
NO.48/PDT/2018/PTBJM)**

**TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
LEVANA ADELLA PRISCILIA
NIM. 2420215320142**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN PT. NO.48/PDT/2018/PTBJM)

Nama : LEVANA ADELLA PRISCILIA

NIM : 2420215320142

Disetujui,

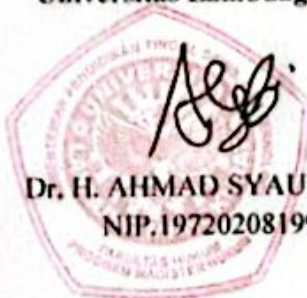
Pembimbing



Dr. MULYANI ZULAEHA, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP.1972020819991004

Tanggal Lulus :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Wisuda :

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

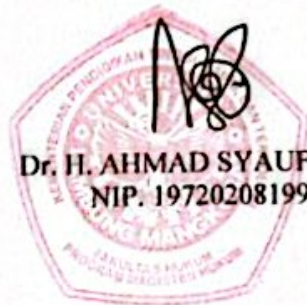
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Dr. MULYANI ZULAEHA, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. AHMAD SYAUFİ, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVANA ADELLA PRISCILIA**

NIM : **2420215320142**

Program Studi : **Magister Hukum**

Konsentrasi Hukum : **Hukum Acara**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '1000', and 'METE TEMAN'. The signature is stylized and covers the right side of the stamp.

LEVANA ADELLA PRISCILIA

NIM. 2420215320142

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

LEVANA ADELLA PRISCILIA. 2026. ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan PT. No.48/PDT/2018/PTBJM). Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 104 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai persoalan dalam penerapan prinsip *strict liability* pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi, khususnya terkait beban pembuktian dan adanya kekaburan norma mengenai parameter "ancaman serius" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan semakin kompleks ketika prinsip *strict liability* dihadapkan dengan alasan *force majeure* yang sering diajukan oleh pelaku usaha sebagai dasar pembebasan tanggung jawab dalam perkara pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi serta penerapan beban pembuktian berdasarkan prinsip *strict liability* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penggunaan *force majeure* sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban mutlak serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penerapan *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme tanggung jawab mutlak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala akibat adanya kekaburan norma mengenai frasa "ancaman serius" serta belum adanya parameter yang jelas mengenai penerapan *force majeure*. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM, hakim tetap menerapkan prinsip *strict liability* dengan menitikberatkan pada terjadinya kerusakan lingkungan dalam wilayah konsesi perusahaan tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang harus diutamakan meskipun terdapat dalil keadaan memaksa yang diajukan oleh pihak tergugat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *strict liability* merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam hukum lingkungan yang bertujuan memberikan kemudahan pembuktian bagi pihak yang dirugikan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penggunaan alasan *force majeure* tidak dapat diterapkan secara otomatis untuk menghapus tanggung jawab pelaku usaha, melainkan harus dinilai secara ketat berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang memberikan parameter yang lebih jelas mengenai ancaman serius dan batasan *force majeure* agar tercipta kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, serta efektivitas perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

LEVANA ADELLA PRISCILIA. 2026. Analisis Yuridis Beban Pembuktian Prinsip *Strict Liability* dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Putusan PT. No.48/PDT/2018/PTBJM). Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 104 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Strict Liability*, Beban Pembuktian, Sengketa Lingkungan Hidup, *Force Majeure*, Putusan Pengadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam penerapan prinsip *strict liability* pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya terkait beban pembuktian serta kekaburan norma mengenai frasa "ancaman serius" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika alasan *force majeure* diajukan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab dalam perkara kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi, penerapan beban pembuktian berdasarkan prinsip *strict liability* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM, serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap penggunaan *force majeure* sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban mutlak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* merupakan instrumen hukum yang memberikan kemudahan pembuktian bagi pihak yang dirugikan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada terjadinya kerusakan lingkungan dalam wilayah penguasaannya, sedangkan alasan *force majeure* tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum tanpa pembuktian bahwa keadaan tersebut benar-benar berada di luar kendali pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter ancaman serius dan batasan *force majeure* guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi penerapan prinsip *strict liability*, serta perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif.

LEVANA ADELLA PRISCILIA. 2026. *Juridical Analysis of the Burden of Proof under the Strict Liability Principle in Environmental Disputes (A Study of High Court Decision No. 48/PDT/2018/PTBJM)*. Master of Law Program, Faculty of Law, Graduate School, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., 104 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Strict Liability, Burden of Proof, Environmental Dispute, Force Majeure, Court Decision.*

This research is motivated by the continuing legal issues surrounding the implementation of the strict liability principle in environmental disputes, particularly concerning the burden of proof and the ambiguity of the phrase "serious threat" as stipulated in Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The issue becomes more complex when force majeure is invoked as a defense to avoid liability for environmental damage. This study aims to analyze the legal framework governing environmental dispute resolution through litigation, examine the application of the burden of proof under the strict liability principle in the High Court of Banjarmasin Decision Number 48/PDT/2018/PT BJM, and evaluate the judges' legal considerations regarding force majeure as an excuse in strict liability cases. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with legal materials analyzed prescriptively through library research. The findings indicate that the strict liability principle serves as a legal instrument designed to simplify the burden of proof by eliminating the requirement to prove fault. The High Court Decision affirms that corporate liability is established based on the occurrence of environmental damage within the company's concession area, while force majeure cannot automatically eliminate legal responsibility unless it is proven that the event was entirely beyond the control of the business entity. Therefore, clearer legal standards concerning the definition of a serious environmental threat and the application of force majeure are necessary to ensure legal certainty, consistency in the application of the strict liability principle, and more effective environmental protection in Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN PT. No.48/PDT/2018/PTBJM)”

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang membangun untuk menyusun penelitian tesis ini;
5. untuk yang terkasih, **Almarhumah Hj. Nurhaina, S.H.**, selaku mamah tercinta yang telah berpulang terlebih dahulu meninggalkan kami semua pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023. Apa yang penulis capai hari ini seluruhnya dipersembahkan untuk mamah tersayang. Terimakasih mamah telah memberikan bukti nyata ada cinta paling tulus didunia.
6. Kepada Papah tersayang, **H. Muhammad Helmi, S.AP.**, yang selalu menyertakan doanya. Lancarnya kehidupan penulis saat ini bukan karena usaha sendiri tetapi merupakan hasil dari doa dan amal kebaikan orang tua yang selalu menyertai. Terimakasih papah karna putri kecil satu-satunya ini selalu dilimpahkan kasih sayang yang tak terhingga;

7. kepada **Ibu Hj. Fauziah Asurayatie**, Tante **Nana Diana, S.H.**, dan Keponakan **Syira Lovena Kadzia**, merupakan bagian penting dalam hidup yang penulis kasih. Sungguh merupakan keberuntungan hidup bisa lahir di keluarga yang selalu memberikan kasih sayang. Terimakasih telah menggantikan peran dan kasih sayang mamah yang hilang untuk selamanya;
8. kepada **Veronika Vina Tri Ardhani**, sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tentunya memberikan solusi dan motivasi;
9. kepada dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi teman baik untuk penulis hingga menyelesaikan tesis ini;
10. dan yang terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berhasil mencapai titik ini. Walaupun terkadang hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kemauan tetapi tetaplah berusaha dan yakin rencana Allah SWT. lebih indah dari apa yang kita punya. Kehilangan mamah merupakan suatu kejadian yang membuat penulis menjadi sosok yang lebih mandiri dan kuat. Kiranya dulu kehilangan mamah adalah badai paling kencang dalam hidup ternyata fase mengikhlaskan dan melanjutkan hidup tanpa mamah jauh lebih berat. Tetapi penulis tidak berhenti bermimpi dan tidak menyerah, hari ini Allah bayarkan satu persatu sabar dan ikhlas penulis, penulis yakin dari surga-Nya yang paling indah mamah bangga melihat puteri kecilnya yang selalu diperlakukan seperti anak berumur 5 tahun di 22 tahunnya itu menggapai apa yang mamah citakan, yaitu memiliki anak yang berpendidikan dan mandiri. Della berhasil mah.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2026

LEVANA ADELLA PRISCILIA
NIM. 2420215320142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Keaslian Penelitian.....	9
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
	E. Tinjauan Pustaka	15
	F. Metode Penelitian	38
	G. Sistematika Penulisan	43
BAB II	PENGATURAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN	
	PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN STRICT LIABILITY	
		47
	A. Analisis Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Litigasi di Indonesia	47
	B. Analisis Penerapan Beban Pembuktian Terkait Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM	60
	C. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip <i>Strict Liability</i>	71
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP FORCE MAJEURE	
	DALAM STRICT LIABILITY.....	80

	A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penggunaan Force Majeure sebagai Alasan Pemaaf dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM.....	80
	B. Analisis Kedudukan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Apabila Bertemu dengan Force Majeure dalam Penerapan Strict Liability.....	88
	C. Analisis Implikasi Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Kepastian Hukum dalam Penerapan Strict Liability.....	97
BAB IV	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran.....	105
Daftar Pustaka.....		1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	12
-------------------------------------	----